



**SAMBUTAN/KEYNOTE SPEECH PIMPINAN DPR RI
DALAM ACARA FOCUS GROUP DISCUSSION KOMISI III
"URGENSI REVISI UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA DAN
UNDANG-UNDANG NARKOTIKA"
HARI KEDUA**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Shalom. Namo Budhaya. Om Swastiastu. Salam Kebajikan.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang Kami hormati Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi III DPR RI,

Yang Kami hormati Para Narasumber yang hadir pada hari ini:

- 1. Saudara Direktur Hukum/Plt. Deputi Hukum dan Kerjasama BNN RI (Susanto, S.H., M.H.)**
- 2. Saudara Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri (Brigjen Pol. Krisno H. Siregar)**
- 3. Saudari Dekan Fakultas Hukum Unika Atmajaya (Dr. iur. Asmin Fransiska, S.H., M.Hum.)**

Beserta seluruh hadirin dalam kesempatan yang baik ini.

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia dan perkenan-Nya, kita diberi nikmat kesehatan untuk dapat hadir dalam acara *Focus Group Discussion (FGD)* yang diselenggarakan oleh Komisi III DPR RI yang berjudul "*Urgensi Revisi Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan Undang-Undang Narkotika*". Dalam kesempatan ini, atas nama Komisi III DPR RI, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI, Para Narasumber, Moderator, dan seluruh perwakilan lembaga sebagai peserta FGD yang berkenan untuk hadir pada hari kedua acara kita ini.

Perkenankanlah saya memberi pendahuluan untuk memulai acara ini. Bahwa sebagaimana tugas konstitusional, DPR RI menjalankan tugas legislasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Komisi III DPR RI dalam hal ini telah mendapat penugasan untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (RUU Narkotika).

Hadirin yang saya hormati,

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana termaktub dalam Konstitusi. Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum yang bersih dan berwibawa menjadi suatu syarat utama negara yang menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa sistem penegakan hukum dan peradilan yang telah berjalan saat ini dirasa masih belum memberikan kepuasan pada masyarakat, khususnya dalam memberantas Narkoba. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang dilakukan oleh BNN, Polri, dan seluruh pihak terkait, dirasa masih belum efektif. Angka prevalensi dan penyalahgunaan narkoba justru meningkat. Cita-cita untuk menjadikan Indonesia "Zero Narkoba" justru berubah menjadi "Darurat Narkoba".

Selain itu, fenomena penuhnya Lembaga Pemasyarakatan yang didominasi oleh Narapidana Tindak Pidana Narkotika menjadi refleksi bahwa strategi dan arah program pemberantasan Narkotika belum menysasar pada akar permasalahannya dan membutuhkan pembaruan. Selama ini pelaksanaan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirasa masih lebih menitikberatkan pada pemidanaan yang pada prakteknya menimbulkan ketidakpastian hukum dalam kategorisasi pelaku, celah penyalahgunaan kewenangan, dan terlebih lagi belum secara efektif menyentuh akar permasalahan peredaran gelap Narkoba di Indonesia.

Oleh sebab itu, Komisi III DPR RI berupaya untuk terus menghadirkan modernisasi sebagai respon terhadap perubahan dinamika hukum dan masyarakat. Komisi III DPR RI dalam hal ini, terus mengawasi implementasi dari sistem penegakan hukum agar berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mendukung dari sisi legislasi terhadap penciptaan sistem penegakan hukum yang bersih, adil, dan berkepastian hukum. Melalui perubahan terhadap UU Narkotika, diharapkan terdapat ketentuan yang mampu menegaskan posisi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika secara seimbang terhadap perspektif kesehatan dan penegakan hukum secara seimbang, proporsional, dan tepat.

Maka saya selaku Pimpinan Komisi III DPR RI dan Ketua Panitia Kerja RUU tentang Narkotika Komisi III DPR RI berharap agar dengan acara ini nantinya dapat membantu kita semua untuk menghasilkan formula dalam menyempurnakan ketentuan tentang Narkotika yang efektif dan komprehensif. Saya berharap agar FGD ini dapat bermanfaat bagi Komisi III DPR RI, khususnya para Anggota Panja melalui seluruh materi-materi, masukan, saran, dan informasi yang disampaikan oleh Para Narasumber maupun peserta FGD ini.

Sebagai kata penutup, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Komisi III DPR RI, Para Narasumber, Moderator, peserta FGD dari berbagai lembaga, dan panitia penyelenggara acara ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu atas terselenggaranya acara ini. Maka dengan ini, saya **membuka** acara *Focus Group Discussion* (FGD) di hari kedua ini. Besar harapan saya agar acara ini dapat berjalan dengan sukses, lancar, dan bermanfaat bagi kita semua.

Terima Kasih

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Shalom. Namo Budhaya. Om Santi Santi Santi Om. Salam Kebajikan.

PIMPINAN KOMISI III DPR RI,

ttd

IR. PANGERAN KHAIRUL SALEH, M.Si.